

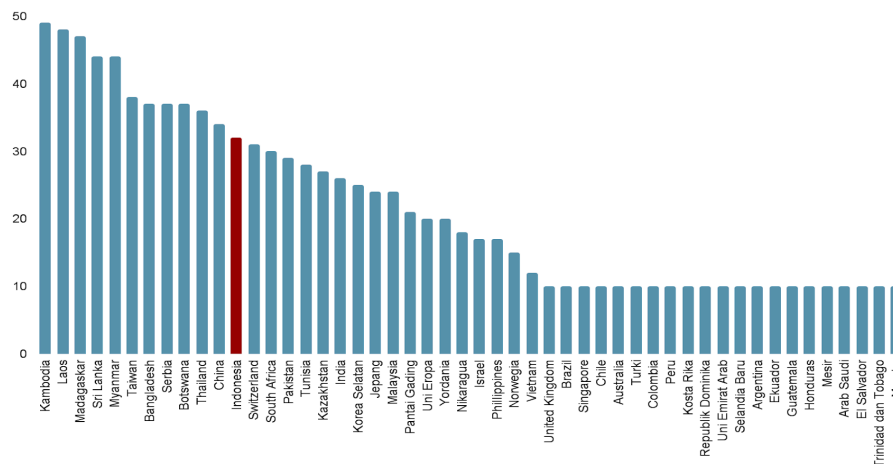
# Penerapan Tarif Resiprokal AS dan Dampaknya terhadap Indonesia

Meita Rosa Indah & Agustoni W  
Insight Ecobank Solution

## Pendahuluan

Pada 7 April 2025, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal minimum 10% terhadap negara mitra dagang, disesuaikan dengan surplus atau defisit perdagangan dengan AS. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan defisit perdagangan terbesar di dunia yaitu mencatat defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun dolar AS dengan 92 negara pada tahun 2024. Adanya kebijakan resiprokal ini bertujuan membalas praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dan respon terhadap defisit tersebut. Adapun besaran kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap mitra dagangnya tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1. Penerapan Tarif Resiprokal AS terhadap Mitra Dagang



Sumber: The White House

Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa inisiatif AS ini bersifat sepihak dan bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian WTO. Tindakan pengenaan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS telah melebihi batas bound tariff berdasarkan skedul konsesi tariff AS pada GATT schedule concessions sebagaimana telah diatur dalam pasal II:1(a) dan II:1(b) GATT. Pasal II:1(a) of GATT 1994, tentang tarif bea masuk dan perlakuan non-diskriminatif yang mengatur setiap negara anggota GATT harus memberikan perlakuan dan tingkat tarif yang sama kepada produk impor dari negara-negara anggota WTO lainnya, Kedua, yaitu Pasal II:1(B) GATT 1994, mengatur tentang kewajiban negara-negara anggota untuk tidak mengenakan biaya atau pungutan lain pada impor melebihi yang telah disepakati dalam daftar konsesi tarif mereka.

**Adanya kebijakan tarif resiprokal ini, memicu respon strategis dari pemerintah Indonesia sendiri maupun dunia usaha.** Dari pemerintah Indonesia, penerapan kebijakan ini memberikan refleksi terhadap industri domestik termasuk pentingnya penguatan ekosistem industri dalam negeri agar dapat memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain, pentingnya mendorong kerjasama regional, dan kebijakan yang tepat baik dari sisi fiskal, moneter, dan sektor riil. Sementara itu, dari sisi dunia usaha menilai adanya penerapan tarif ini dapat memberikan peluang maupun tantangan tersendiri dimana Indonesia berkesempatan meningkatkan pangsa pasar di AS. Mengingat negara pesaing terdekat di pasar tersebut (terutama China, Thailand, dan Vietnam) dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi. Namun, tak terlepas dari tantangan yaitu adanya hambatan regulasi, hambatan pembiayaan dalam berusaha dan pelemahan daya beli.

**Analisis mendalam terhadap akar permasalahan serta perumusan strategi respons yang komprehensif menjadi sangat penting** dalam menghadapi tekanan perlambatan ekonomi yang diproyeksikan akan terus berlanjut. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat hingga 0,3 hingga 0,5 poin persentase, menurunkan proyeksi dari 5,1% menjadi sekitar 4,7% pada tahun 2025. Tren ini sudah mulai terlihat pada kuartal pertama 2025, di mana pertumbuhan PDB tercatat hanya sebesar 4,87% secara tahunan, turun dari 5,04% pada kuartal sebelumnya. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat seperti elektronik, tekstil, garmen, alas kaki, dan furniture diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak, dengan potensi kontribusi negatif langsung terhadap PDB sekitar 2%. Dalam konteks ini, diperlukan respons kebijakan yang tepat sasaran dan terukur untuk menjaga stabilitas pertumbuhan sekaligus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri.

## **II. Alasan Utama Pengenaan Tarif 32% (April 2025) oleh Amerika Serikat**

Pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia didasari oleh faktor utama yang mencerminkan pergeseran dalam pendekatan kebijakan perdagangan AS.

### 1) Defisit Perdagangan Bilateral AS-Indonesia:

Salah satu alasan utama yang secara eksplisit disebutkan oleh Presiden Trump adalah mengurangi defisit perdagangan AS yang berkelanjutan dengan Indonesia dimana tahun 2024 defisit meningkat 5.4% (\$923 juta) dari tahun 2023. Total impor barang AS dari Indonesia pada tahun 2024 mencapai \$28.1 miliar, naik 4.8% dari 2023, sementara ekspor barang AS ke Indonesia hanya \$10.2 miliar, naik 3.7%. Bagi pemerintahan Trump, defisit perdagangan yang signifikan dan terus meningkat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator "kerugian" dalam pandangan ekonomi merkantilisme. Oleh karena itu, tarif menjadi alat utama untuk "menyeimbangkan kembali perdagangan dan mendapatkan pengaruh dalam negosiasi.

### 2) Hambatan Non-Tarif Indonesia yang Menjadi Perhatian AS

Selain defisit perdagangan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga menyoroti beberapa hambatan non-tarif (Non-Tariff Barriers/NTBs) yang diterapkan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif yang dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1: Hambatan Non-Tarif Utama Indonesia yang Disoroti AS

No	Jenis hambatan	Deskripsi Kebijakan Indonesia	Kekhawatiran AS

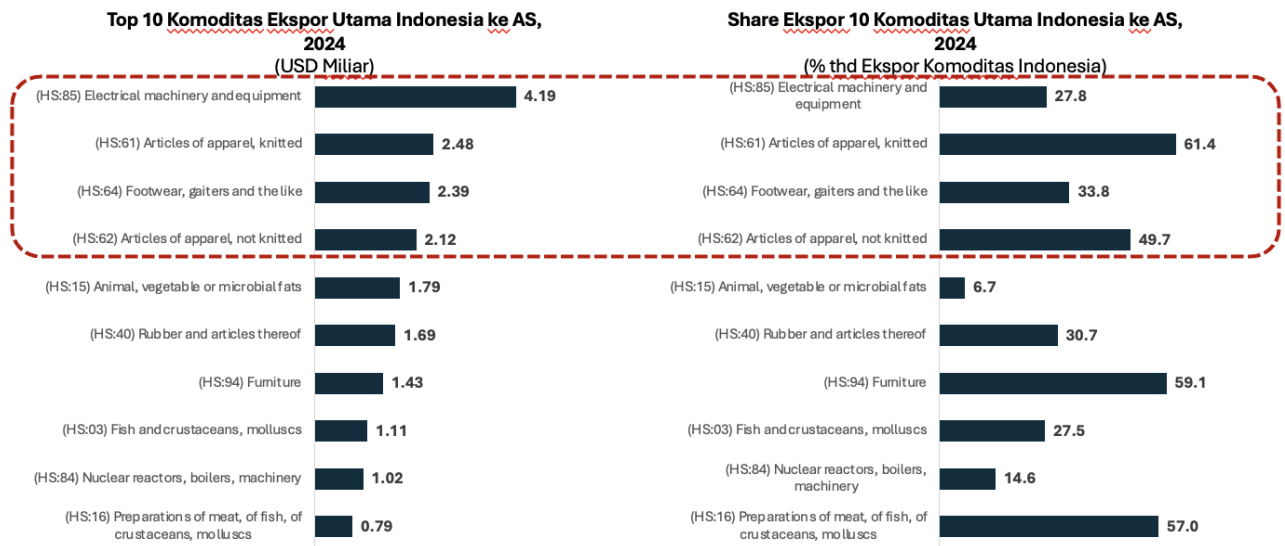
1	Regulasi Impor yang Rumit dan Berbelit	Persyaratan perizinan yang berlapis.	Proses audit yang tidak transparan, dan kurangnya konsultasi dengan pemangku kepentingan.
2	Kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Indonesia sedang merancang ulang TKDN menjadi berbasis insentif.	AS menganggap kebijakan TKDN ini membatasi kemampuan perusahaan AS untuk menjual produk telekomunikasi dan elektronik di pasar Indonesia
3	Proses Pemeriksaan di Bea Cukai	Proses Pemeriksaan yang lama, biaya administrasi dan klaim pengembalian yang berbelit	AS mengeluhkan proses bea cukai yang tidak transparan, denda administratif yang besar, serta proses klaim pengembalian kelebihan pajak yang memakan waktu.
5	Larangan ekspor Nikel	Pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak Januari 2020 untuk hilirisasi dan peningkatan nilai tambah dalam negeri	Pembatasan akses pasar terhadap bahan baku penting, dianggap sebagai distorsi perdagangan.
6	Persyaratan Pusat Data Lokal	Kewajiban bagi penyedia kartu debit/kredit dan operator sistem elektronik (ESO) untuk memiliki pusat data di Indonesia dan menyediakan akses data kepada otoritas.	Hambatan operasional dan biaya kepatuhan tinggi bagi perusahaan AS, kekhawatiran tentang keamanan data dan "backdoor access".
7	Faktor geopolitik juga turut berperan dalam keputusan tarif AS antara lain keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BRICS	Hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menekan negara-negara agar tidak "menyelaraskan diri dengan kebijakan Anti-Amerika BRICS".	Di mana kebijakan perdagangan BRICS dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari persaingan kekuatan global antara AS dan blok-blok ekonomi lainnya. Situasi ini secara signifikan memperumit upaya negosiasi, karena melibatkan pertimbangan yang lebih luas dari sekadar isu perdagangan bilateral.

### III. Dampak Tarif terhadap Ekonomi Indonesia

- Dampak terhadap Dunia Usaha dan Sektoral

**Tarif yang tinggi ini dapat meningkatkan biaya barang-barang Indonesia di pasar AS, yang mengakibatkan penurunan daya saing dibandingkan produk dari negara lain yang tidak dikenakan tarif atau dikenakan tarif yang lebih rendah.** Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan pesanan dan volume produksi, terutama di sektor-sektor yang mendominasi pasar AS seperti elektronik, pakaian, alas kaki, dan furnitur. Beberapa perusahaan Indonesia mungkin terpaksa mencari alternatif pasar yang lebih murah atau bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan basis operasi ke negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam atau Kamboja untuk menghindari pembatasan tarif.

**Gambar 2. Top 10 Komoditas dan Share Ekspor Komoditas Indonesia ke AS**



Sumber: UN Comtrade

Berdasarkan Gambar 2, komoditas ekspor nonmigas Indonesia ke AS yang paling berpotensi terdampak adalah: Mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85), Pakaian dan aksesoris rajutan (HS 61) & bukan rajutan (HS 62), Alas kaki (HS 64), Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), Karet dan barang dari karet (HS 40). Sektor tekstil dan pakaian, yang merupakan ekspor dengan shares terbesar kedua untuk pasar AS, rentan terhadap tarif ini dan berpotensi menghadapi pengurangan ekspor dan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Mulai kuartal kedua 2025, kinerja ekspor khususnya pada produk tekstil dan alas kaki diperkirakan akan mengalami penurunan akibat kenaikan tarif bea masuk dan semakin menipisnya margin daya saing. Kondisi ini berpotensi memicu ancaman pemutusan hubungan kerja di industri padat karya, terutama di sektor sepatu dan garmen di Jawa Barat, apabila tarif tersebut bertahan lebih dari enam bulan. Sektor elektronik juga dapat mengalami penurunan permintaan karena peningkatan biaya. Demikian pula, industri alas kaki, yang mengekspor sebagian besar produknya ke AS, menghadapi tantangan daya saing yang besar. Bahkan komoditas seperti minyak sawit, yang merupakan ekspor utama Indonesia, dapat terpengaruh. Secara keseluruhan, tarif ini mengancam surplus perdagangan Indonesia dengan AS.

- **Dampak pada Kebijakan Fiskal**

**Penurunan ekspor sebagai dampak pengumuman tarif yang terjadi berkorelasi langsung terhadap penerimaan negara**, khususnya dari sektor perpajakan seperti Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat sektor ekspor merupakan salah satu kontributor utama dalam struktur penerimaan negara.

**Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal guna meringankan beban para pelaku ekspor.** Langkah-langkah ini mencakup pemberian keringanan pajak ekspor serta dukungan pembiayaan bagi kegiatan ekspor yang terdampak. Harapannya, insentif ini dapat menjaga daya saing produk dalam negeri di pasar global dan mendorong pemulihan kinerja ekspor nasional.

**Di sisi lain, pemerintah juga melihat perlunya peningkatan belanja negara dalam bentuk subsidi**, terutama untuk sektor pertanian dan industri agro. Dukungan ini ditujukan guna memperkuat industri hilir serta mendorong diversifikasi pasar ekspor. Dengan strategi ini, diharapkan struktur ekonomi menjadi lebih tangguh dalam menghadapi gejolak global dan ketergantungan pada pasar tradisional dapat dikurangi.

- **Dampak pada Kebijakan Moneter, Keuangan dan Perbankan**

**Pengumuman diberlakukannya tarif berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, memicu aliran investasi global beralih ke dolar sebagai aset aman (safe haven).** Untuk mengendalikan rupiah, Bank Indonesia (BI) melakukan operasi pasar yang berisiko mengurangi cadangan devisa, yang pada April 2025 turun menjadi 152,5 miliar dolar AS dari 157,1 miliar dolar AS di akhir Maret. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta upaya BI menstabilkan rupiah di tengah ketidakpastian pasar global.

**Selain itu, meningkatnya ketidakpastian perdagangan dan potensi penurunan pendapatan turut menekan pasar modal, tercermin dari penurunan IHSG dan meningkatnya volatilitas.** Melemahnya ekspor akibat tarif memperburuk tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Rupiah yang lebih lemah membuat impor semakin mahal dan berisiko mendorong inflasi domestik. Kekhawatiran investor terhadap dampak tarif juga memicu arus modal keluar, yang semakin memperlemah rupiah.

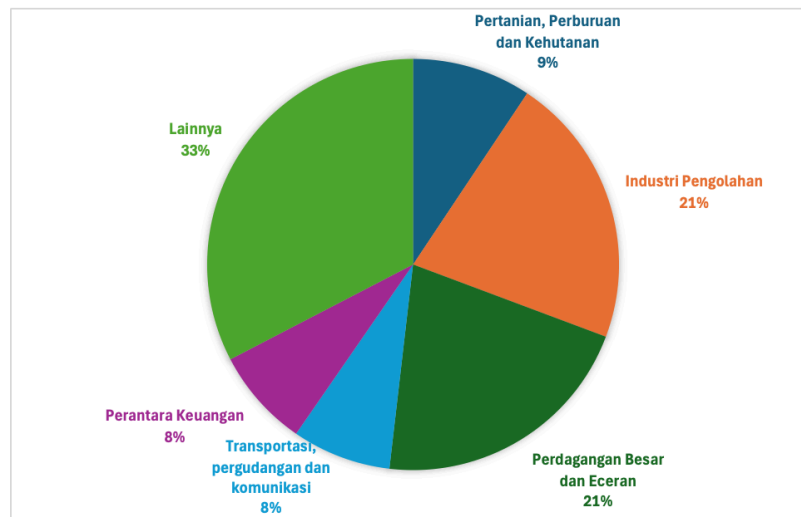
**Sektor perbankan Indonesia juga menghadapi risiko tidak langsung akibat tarif AS.** Bisnis-bisnis berorientasi ekspor yang terkena dampak tarif mungkin mengalami kesulitan keuangan, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar pinjaman. Perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan akibat penurunan ekspor juga dapat membatasi pertumbuhan kredit. Selain itu, volatilitas di pasar keuangan yang disebabkan oleh ketidakpastian perdagangan dapat mempengaruhi kinerja sektor perbankan.

**Penurunan volume perdagangan mengurangi pendapatan bank dari Letter of Credit (L/C) dan fee-based income lainnya seperti layanan transfer dana.** L/C adalah instrumen penting dalam perdagangan internasional yang menjamin pembayaran antara eksportir dan importir, dengan biaya provisi sekitar 0,125 persen. Jika sebuah bank nasional memproses 1.000 transaksi ekspor-impor per bulan dengan nilai rata-rata Rp100 juta, pendapatan dari L/C bisa mencapai Rp125 juta per bulan atau Rp1,5 miliar per tahun. Selain itu, bank juga meraih pendapatan dari layanan transfer dana masuk dan keluar. Dengan volume sekitar 10.000 transaksi per bulan dan biaya Rp10.000 per transaksi, bank bisa memperoleh Rp100 juta per bulan atau Rp1,2 miliar per tahun dari jasa remitansi. Jumlah ini cukup signifikan sebagai sumber pendapatan non-kredit. Bagi bank-bank devisa kontribusi dari fee-based income yang bersumber dari perdagangan dan jasa keuangan dapat mencapai 30 persen dari total pendapatan non-bunga.

Dampak tarif resiprokal AS terhadap perbankan Indonesia pada dasarnya tidak bersifat sistemik dari sisi volume kredit, tetapi tetap signifikan dalam menciptakan tekanan risiko pada klaster tertentu serta memicu efek rambatan ke sektor lain. Secara nominal, porsi kredit perbankan ke sub sektor padat karya berorientasi ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan pangan olahan relatif kecil, umumnya di bawah lima persen dari total portofolio industri perbankan. Hal ini berarti guncangan tarif tidak serta-merta menggoyahkan stabilitas sistem keuangan, terutama dengan indikator kesehatan perbankan yang masih solid. NPL agregat berada di kisaran 2,2–2,3 persen, LCR hampir 200 persen, dan CAR di atas 25 persen. Per Februari 2025, porsi kredit perbankan ke sektor industri pengolahan mencapai 15,69 persen dan ke perdagangan besar sekitar 14,98 persen dari total kredit. Kredit sektor manufaktur tumbuh 11,46 persen yoy, dengan NPL gross 2,93 persen dan Loan at Risk sekitar 10,08 persen. Di dalamnya, subsektor TPT yang mencakup tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki mencatat kredit Rp103,55 triliun dengan pertumbuhan hanya 0,19 persen yoy, sementara subsektor kulit dan alas kaki relatif lebih baik, tumbuh masing-masing 14,14 persen dan 3,54 persen yoy. Secara keseluruhan, kredit ke industri TPT dan alas kaki hingga Maret 2025 mencapai Rp160,41 triliun atau sekitar 2,03 persen dari total kredit nasional.

Kredit perbankan Indonesia secara agregat masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi, dengan porsi gabungan sekitar 20 persen pada periode Juni 2024 hingga Juni 2025. Meski sub sektor padat karya ekspor berada di dalam kelompok industri pengolahan, kontribusinya terhadap portofolio kredit perbankan nasional relatif kecil. Dengan demikian, risiko langsung dari tarif resiprokal terhadap stabilitas perbankan memang terbatas.

**Gambar 2. Proporsi kredit berdasarkan sektor**



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK.

Kerentanan utama justru terletak pada karakteristik subsektor padat karya yang memiliki margin usaha tipis, ketergantungan tinggi pada pasar ekspor AS, dan intensitas tenaga kerja yang besar. Tekanan pada arus kas korporasi akibat tarif berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar, sementara penyesuaian berupa PHK atau penurunan pendapatan pekerja dapat mendorong kenaikan NPL pada kredit konsumsi seperti KPR, KKB, dan kredit multiguna. Dengan kata lain, dampak yang lebih berbahaya bukan berasal dari besarnya porsi kredit langsung ke sektor terdampak, tetapi dari efek transmisi ke rumah tangga dan persepsi risiko bank yang cenderung lebih hati-hati menyalurkan kredit baru ke sektor industri pengolahan maupun perdagangan.

Selain itu, tarif resiprokal juga membawa konsekuensi makro-finansial. Sentimen investor dapat tertekan, memicu capital outflow dan pelemahan nilai tukar rupiah. Bank dengan ketergantungan tinggi pada pendanaan valas atau yang aktif dalam pembiayaan perdagangan berbasis dolar akan menghadapi tekanan biaya dana serta risiko mismatch valas. Dengan demikian, tarif resiprokal AS tidak langsung mengguncang perbankan Indonesia dari sisi besaran kredit, tetapi dapat menekan kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas bank melalui jalur kenaikan NPL sektoral, pelemahan konsumsi rumah tangga, dan volatilitas pasar keuangan.

### **Strategi Diplomasi Dagang**

#### **Peluang dan Tantangan**

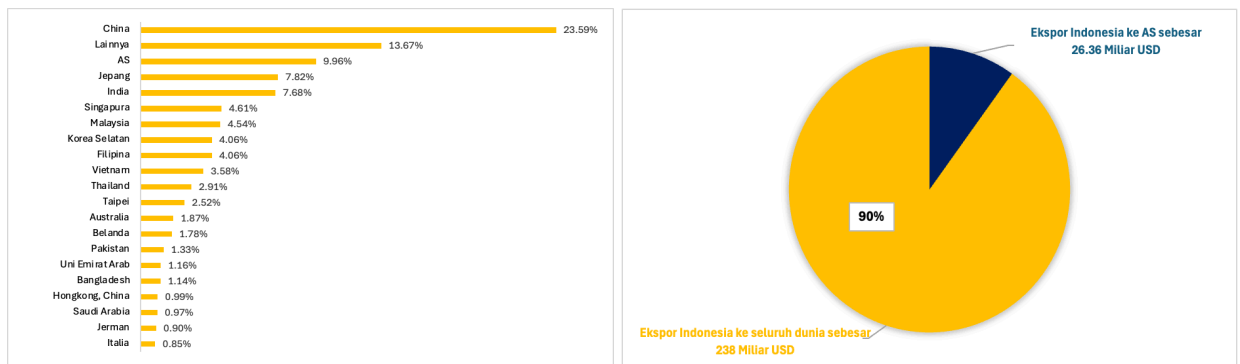
**Indonesia sebenarnya memiliki daya tawar strategis yang kuat dalam menghadapi negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.** Salah satu kekuatan utama Indonesia terletak pada penguasaan sumber daya mineral kritis, khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia dengan pangsa produksi global mencapai 51-61% dan menguasai sekitar 42-55% cadangan nikel dunia. Nikel merupakan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik (EV), sektor yang menjadi prioritas strategis Amerika. Kondisi ini memberi Indonesia posisi tawar yang sangat penting karena AS membutuhkan diversifikasi pasokan mineral untuk mengurangi ketergantungan pada

China. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor tekstil dan alas kaki. Produk dari kedua sektor ini merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, dengan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

**Posisi geopolitik Indonesia sebagai anggota G20 dan ketua ASEAN pada 2023 juga memperkuat daya tawarnya.** Dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik dan keterlibatan Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan AS semakin strategis. Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor industri dan energi. Upaya hilirisasi nikel dan investasi dalam energi terbarukan menjadi nilai tambah yang sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Biden terkait green economy.

**Sebagai tambahan, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat luas dengan jumlah penduduk lebih dari 275 juta jiwa.** Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menarik bagi investasi dan perluasan bisnis perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Kombinasi kekuatan dalam hal sumber daya alam, sektor ekspor andalan, letak geografis yang strategis, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, serta besarnya potensi pasar domestik, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam upaya memperoleh perlakuan tarif yang lebih menguntungkan dari Amerika Serikat.

**Gambar 3. Share Ekspor Indonesia (2024)**



Sumber: BPS dan UN Comtrade

**Di sisi lain, pangsa perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat hanya sekitar 10% dari total perdagangan secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS relatif rendah.** Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 26,36 miliar USD, dengan kontribusi terbesar berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan listrik yang mencapai sekitar 4,18 miliar USD. Kondisi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk bersikap lebih selektif dalam merespons berbagai permintaan dari Amerika Serikat, termasuk dalam hal penetapan kebijakan strategis. Dengan posisi daya tawar yang dimiliki, Indonesia tidak harus sepenuhnya tunduk pada kehendak AS, melainkan dapat mengambil keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

**Namun, apakah daya jika daya tawar tersebut tidak diikuti dengan perbaikan siklus bisnis itu sendiri.** Salah satu tantangan paling serius yang terus menghambat daya saing ekonomi Indonesia adalah buruknya sistem perizinan dan logistik yang kerap menyulitkan pelaku usaha, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Prosedur yang panjang, birokrasi yang saling tumpang tindih, serta perubahan regulasi yang kerap terjadi secara mendadak membuat pelaku usaha kesulitan menyusun strategi dan rencana bisnis jangka panjang. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2023, proses impor di Indonesia memerlukan waktu rata-rata 17 hari—jauh lebih lambat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand. Skor efisiensi bea cukai Indonesia pun hanya berada di angka 2,8 dari skala 5, mencerminkan tingginya tingkat inefisiensi dan potensi praktik yang tidak transparan. Ketidakjelasan prosedur antarinstansi sering kali menimbulkan biaya tambahan yang tidak terduga dan memperbesar ketidakpastian usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan langkah deregulasi yang nyata, termasuk memangkas perizinan yang tumpang tindih, menyelaraskan standar produk dengan ketentuan internasional, serta menjamin bahwa kebijakan dan aturan dijalankan secara transparan, konsisten, dan dapat diprediksi. Tanpa pembenahan serius dalam aspek ini, Indonesia berisiko tertinggal lebih jauh dari para pesaing regional dan gagal memanfaatkan peluang strategis dari berbagai kerja sama perdagangan internasional.

### **III. Perkembangan Terkini Negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat**

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa 15 Juli 2025 mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia dimana AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. AS dan Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi hambatan nontarif Indonesia, termasuk membebaskan perusahaan-perusahaan AS dan barang asal AS dari persyaratan kandungan lokal dan menerima kendaraan yang dibuat sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS.
- b. Menerima sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran sebelumnya untuk alat kesehatan dan produk farmasi; menghapus persyaratan pelabelan tertentu; membebaskan ekspor AS untuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari persyaratan tertentu; mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah hak kekayaan intelektual; serta menangani kekhawatiran AS terkait prosedur penilaian kesesuaian (conformity assessment).
- c. Mengatasi hambatan terhadap ekspor AS, antara lain menghapus pembatasan impor atau persyaratan perizinan atas barang rekondisi AS atau komponennya; menghapus persyaratan inspeksi atau verifikasi pra pengiriman terhadap impor barang dari AS; serta mengadopsi dan melaksanakan praktik regulasi yang baik.
- d. Terkait pangan, kedua negara disebut berkomitmen untuk produk pangan dan pertanian AS dari semua rezim perizinan impor, termasuk persyaratan neraca komoditas dan memastikan transparansi dan keadilan terkait indikasi geografis.
- e. Berkomitmen menghapus kode tarif HTS yang berlaku untuk produk tidak berwujud dan menanggukhan persyaratan terkait deklarasi impor; mendukung moratorium permanen atas bea masuk untuk transmisi elektronik di WTO secara langsung dan tanpa syarat.
- f. Memberikan status permanen sebagai Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (FFPO) untuk semua produk tanaman AS yang memenuhi syarat juga mengakui pengawasan regulasi dari

- pihak AS, termasuk mencantumkan seluruh fasilitas pengolahan daging, unggas, dan produk susu AS, serta menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur AS.
- g. Berkomitmen untuk bergabung dalam Forum Global tentang Kelebihan Kapasitas Baja dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja beserta dampaknya.
  - h. Menghapus pembatasan ekspor ke Amerika Serikat untuk komoditas industri, termasuk mineral-mineral penting atau mineral kritis.
  - i. Berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan nasional untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok dan inovasi melalui tindakan saling melengkapi dalam menghadapi praktik perdagangan tidak adil dari negara lain, serta kerja sama dalam pengendalian ekspor, keamanan investasi, dan pemberantasan penghindaran bea masuk.
  - j. Berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi perdagangan digital, jasa, dan investasi, dan akan memberikan kepastian atas kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar wilayahnya ke Amerika Serikat.
  - k. Berkomitmen melindungi hak-hak buruh yang diakui secara internasional. Indonesia akan, antara lain mengadopsi dan melaksanakan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa atau kerja wajib.
  - l. Berkomitmen untuk mempertahankan tingkat perlindungan lingkungan yang tinggi dan menegakkan undang-undang lingkungannya secara efektif, termasuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan dan memberantas perdagangan produk kehutanan hasil pembalakan liar.
    - Pengadaan pesawat dengan nilai saat ini sebesar US\$3,2 miliar.
    - Pembelian produk pertanian, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas, dengan total nilai estimasi US\$4,5 miliar.
    - Pembelian produk energi, termasuk gas petroleum cair (LPG), minyak mentah, dan bensin, dengan nilai estimasi sebesar US\$15 miliar.

**Sesungguhnya hasil dari kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat ini menunjukkan kemenangan bagi kepentingan Amerika Serikat itu sendiri (Another American First Win).** Salah satu isu utama adalah terkait desakan Amerika untuk menghapus pembatasan ekspor Indonesia terhadap mineral kritis, khususnya nikel, yang menjadi bahan baku penting bagi industri baja tahan karat. Amerika melihat larangan ekspor nikel yang diberlakukan Indonesia sebagai hambatan yang merugikan produsen baja mereka. Bahkan, kedekatan Indonesia dengan produsen baja asal Tiongkok melalui skema investasi Belt and Road Initiative (BRI) turut dipandang sebagai ancaman terhadap dominasi industri baja AS di pasar global. Dalam hal ini, pernyataan dari American Iron and Steel Institute (AISI) dengan tegas menunjukkan harapan mereka agar USTR terus menekan Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor nikel dan meninjau kebijakan perdagangan lain yang dianggap "mengganggu pasar". Padahal, kebijakan larangan ekspor nikel yang dijalankan Indonesia selama ini bertujuan strategis: mendorong hilirisasi industri dan menciptakan nilai tambah dalam negeri. Jika tekanan dari AS ini berhasil, maka Indonesia tidak hanya kehilangan kendali atas sumber daya strategis, tetapi juga mengorbankan peluang jangka panjang untuk membangun industri logam nasional yang lebih kuat dan mandiri.

**Tidak berhenti di sektor industri, tekanan juga terjadi di ranah digital.** Presiden Association for Competitive Technology (ACT), Morgan Reed, secara terbuka menyambut baik komitmen Indonesia untuk mendukung moratorium WTO atas pajak dan bea atas layanan digital lintas negara. Ini berarti Indonesia bersedia untuk tidak mengenakan pajak atau bea masuk terhadap produk digital asing—yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat seperti Google, Meta, dan Apple. Di sisi lain, langkah ini sangat kontradiktif dengan arah kebijakan fiskal Indonesia sendiri yang sedang berupaya memperkuat penerimaan pajak dari sektor digital. Dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang pesat, membiarkan produk dan layanan asing bebas dari pajak sama saja dengan mengorbankan potensi penerimaan negara, khususnya dari pelaku usaha asing yang selama ini menikmati keuntungan besar di pasar digital Indonesia tanpa kontribusi fiskal yang sepadan. Lebih lanjut, kesepakatan yang menjamin kebebasan transfer data lintas negara juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Indonesia tengah memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dan mendorong penempatan pusat data di dalam negeri demi menjamin kedaulatan digital. Namun, dengan komitmen terhadap prinsip “data bebas hambatan” yang diusulkan dalam kesepakatan ini, Indonesia berisiko kehilangan kendali atas arus data strategis yang bisa berdampak besar terhadap keamanan siber, privasi warga negara, dan kapasitas negara dalam mengatur ruang digital nasional.

**Sementara itu, di sektor pertanian dalam jangka pendek masuknya kedelai impor berharga murah menguntungkan industri pengolahan namun dalam jangka panjang hal ini justru berisiko memperburuk nasib petani lokal** yang telah lama kesulitan bersaing karena tingginya biaya produksi dan minimnya dukungan struktural. Presiden American Soybean Association (ASA), Caleb Ragland, bahkan secara terbuka memuji keberhasilan pemerintah AS dalam menjaga akses pasar kedelai ke Indonesia, serta komitmen untuk menurunkan hambatan non-tarif. Indonesia sendiri memang menjadi salah satu importir kedelai terbesar di dunia, dan sebagian besar pasokan nasionalnya masih sangat bergantung pada impor dari Amerika Serikat. Jika kesepakatan ini benar-benar membuka keran impor lebih lebar, banjir kedelai murah akan makin menekan daya saing pertanian domestik. Dalam konteks ini, ketergantungan berlebihan terhadap impor tidak hanya berisiko terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga bisa menghambat upaya jangka panjang untuk membangun sektor pertanian yang berdaulat dan berkelanjutan.

**Dengan demikian, kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi AS, tetapi juga menggambarkan semakin kuatnya posisi Amerika dalam membentuk arsitektur perdagangan global yang menguntungkan kepentingan domestiknya.** Amerika Serikat mampu menekan mitra dagangnya untuk menerima ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan strategi industrial dan geopolitik mereka, termasuk dalam isu-isu strategis seperti akses terhadap mineral kritis, liberalisasi produk digital, serta penghapusan hambatan pasar pertanian. Padahal dalam dunia perdagangan internasional, “menang bersama” bukan sekadar slogan dan harus menjadi prinsip yang dijaga dalam setiap kesepakatan. Jika satu pihak terlalu dominan dan terus memaksakan preferensinya, maka prinsip keadilan dan timbal balik yang menjadi dasar sistem multilateral bisa tergerus.

**Indonesia perlu lebih cermat dalam merancang strategi negosiasinya, tidak hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya atau besarnya pasar domestik, tetapi juga dengan**

**memastikan kesiapan institusional dan kebijakan nasional yang tangguh.** Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi pasar yang terbuka lebar bagi produk dan kepentingan negara lain tanpa mampu mengamankan nilai tambah yang berkelanjutan bagi ekonominya sendiri. Perjanjian dagang yang sehat semestinya membuka peluang, bukan memperdalam ketergantungan. Maka, evaluasi kritis terhadap setiap klausul dalam kesepakatan seperti ini menjadi keharusan agar Indonesia tidak sekadar menjadi objek dalam percaturan dagang global, tetapi mampu berdiri sebagai subjek yang menentukan arah dan manfaat dari keterlibatan internasionalnya.

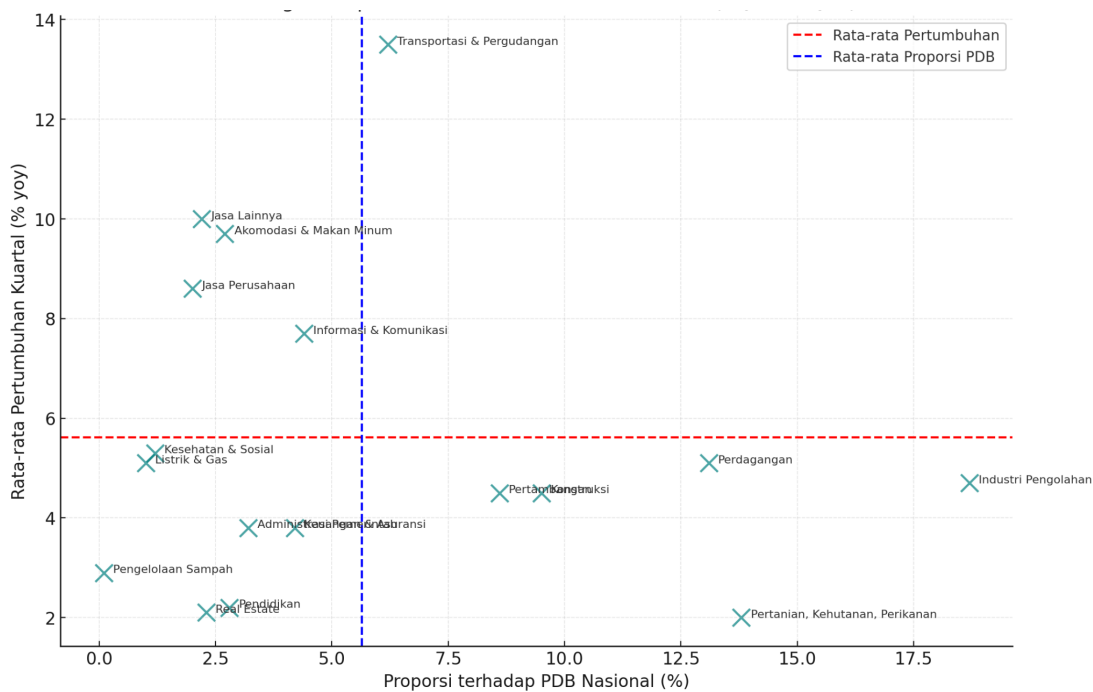
**Dilain sisi, Indonesia tengah menjalankan strategi diversifikasi pasar melalui kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa** yang tercapai setelah sepuluh tahun negosiasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Namun, meskipun upaya ini mencerminkan komitmen dalam diplomasi ekonomi global, kenyataannya daya saing Indonesia di berbagai sektor masih tertinggal dibandingkan negara seperti Vietnam yang lebih cepat memanfaatkan peluang pasar internasional berkat efisiensi logistik, biaya produksi yang lebih rendah, serta infrastruktur dan iklim investasi yang lebih mendukung. Hal ini dijelaskan melalui tabel 2.

Tabel 2: Analisis Daya Saing Indonesia vs Vietnam Pasca-Kesepakatan UE & Tarif AS (2025)

No	Parameter	Indonesia	Vietnam
1	Tarif ke UE	0% (CEPA2025)	0% (EVFTA)
2	Tarif ke AS (umum)+ blokir sawit	19%	20%
3	Akses pasar UE	Keunggulan kompetitif: Tekstil, sawit terolah, kendaraan listrik	Kompetitif di elektronik dan sepatu
4	Akses pasar AS	Sawit dan biodiesel diblokir, nikel kena hambatan lingkungan	Dominan di garmen& elektronik (rantai pasok efisien).
5	Alasan hambatan/ keunggulan:	<p>Sawit (hambatan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan lingkungan (EPA AS), bea masuk CPO 30% (vs minyak kedelai AS 0%). Dampak rugi \$2,1 USD/tahun -GAPKI 2024.</li> </ul> <p>Nikel (Bateri EV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U.S. Environment Protocol Act 2024). Tarif 19% + biaya sertifikasi *USD 15.000/ekspor, Ekspor baterai EV ke AS turun 40% YoY (BPS, Q1 2025)</li> </ul>	<p>Vietnam lebih unggul meski tarif lebih tinggi (20% vs 19%) karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produktivitas buruh 25% lebih tinggi (ILO, 2024) dan Waktu ekspor 5 hari lebih cepat (Cat Lai Port vs Tanjung Priok).</li> </ul>

Dalam hal daya saing produk tekstil, Vietnam memiliki keunggulan dibanding Indonesia. Biaya produksi di Vietnam tercatat sebesar USD 5,5 per unit dengan waktu pengiriman hanya 10 hari, sedangkan di Indonesia biayanya USD 6 per unit dengan pengiriman 15 hari. Artinya, meski tarif impor sama, produk Vietnam tetap lebih murah sekitar 8%. Selain itu, biaya logistik di Vietnam lebih efisien sebesar 10% dibandingkan Indonesia yang mencapai 14%. Dari sisi konektivitas, Vietnam mencatat indeks 4,5 dari 5, lebih tinggi dibanding Indonesia yang berada di angka 3,8, di bawah rata-rata ASEAN sebesar 4,2. Dalam hal investasi asing langsung (FDI) pada 2024, Vietnam juga lebih menarik dengan total USD 3,6 miliar, sementara Indonesia mencapai USD 28 miliar, namun lebih tersebar di sektor lain. Dari sisi upah tenaga kerja di sektor manufaktur, Vietnam lebih kompetitif dengan rata-rata upah USD 250 per bulan dibanding Indonesia yang mencapai USD 320 per bulan.

**Gambar 4. Hubungan Proporsi PDB dan Pertumbuhan Sektor (1Q22 - 2Q25)**



Sumber : BPS, diolah.

Selain itu, Grafik menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional justru mengalami pertumbuhan yang relatif rendah. Misalnya, **Industri Pengolahan** yang menyumbang sekitar **18,7% terhadap PDB** hanya tumbuh rata-rata **4,7%**, sementara **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** dengan kontribusi **13,8% terhadap PDB** bahkan hanya tumbuh **2,0%**. Sebaliknya, sektor-sektor jasa seperti **Transportasi dan Pergudangan** yang kontribusinya **6,2%** mampu tumbuh pesat hingga **13,5%**, begitu pula **Jasa Lainnya** dengan pertumbuhan **10,0%** meski proporsinya lebih kecil. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara share terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan, di mana sektor-sektor besar yang seharusnya menjadi motor utama ekonomi justru menunjukkan kinerja yang melambat. Jika tren ini berlanjut, daya saing nasional akan tertekan, sehingga dibutuhkan reformasi kebijakan yang mampu mendorong akselerasi

pertumbuhan di sektor-sektor utama, terutama industri pengolahan dan pertanian, melalui deregulasi, insentif fiskal, dan adopsi teknologi yang lebih luas.

### **Memperkuat daya saing lokal Indonesia**

Untuk memperkuat daya saing industri lokal, diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan pelaku usaha, dan dukungan ekosistem bisnis. Salah satu faktor penting adalah akses permodalan yang mudah dan terjangkau, misalnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yang membantu pelaku usaha kecil dan menengah memperluas produksi, meningkatkan kapasitas, serta mengadopsi teknologi baru. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan efisiensi logistik juga berperan besar, karena ketersediaan jalan, pelabuhan, energi, dan sistem distribusi yang efisien dapat menurunkan biaya produksi dan membuat produk lokal lebih kompetitif dibandingkan impor.

Faktor lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yang bisa dilakukan melalui program pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta insentif adopsi teknologi digital dan otomasi untuk mendukung inovasi serta produktivitas. Terakhir, dukungan kebijakan fiskal dan insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, atau PPN ditanggung pemerintah bagi industri strategis akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus berinvestasi, memperkuat kapasitas, dan memperluas pasar. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, industri lokal akan lebih tangguh dan mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional.

### **Kesimpulan**

1. Amerika Serikat terkesan semakin dominan dalam memaksakan kepentingan domestiknya. Melalui tekanan diplomatik dan kekuatan ekonomi, AS mampu mendorong negara mitra untuk menerima ketentuan-ketentuan yang mendukung strategi industri, teknologi, dan geopolitik mereka.
2. Kesiapan pemerintah, dunia usaha, dan perbankan dalam mengantisipasi perkembangan situasi terkini perdagangan Amerika dengan China dan mitra dagangnya terkesan lambat.
3. Daya saing industri Indonesia hanya bertumpu pada beberapa komoditas tertentu antara lain industri mining, kelapa sawit, dan logam dasar.
4. Diplomasi perdagangan yang diperjuangkan oleh tim negosiasi terkesan kurang bersinergi dengan baik di dalam negeri bersama sektor-sektor terkait lainnya. Keterbukaan dan transparansi pemerintah kepada publik terkait tahapan proses negosiasi dengan Amerika dinilai kurang optimal.

### **Rekomendasi :**

1. Reformasi kebijakan dalam negeri menjadi krusial bagi Indonesia untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat dan menghindari risiko tarif tinggi. Indonesia perlu melakukan koreksi kebijakan yang signifikan, antara lain melalui deregulasi dan penyederhanaan prosedur impor, revisi kebijakan TKDN agar berbasis insentif, peningkatan transparansi bea cukai, penyesuaian aturan sertifikasi halal, serta pemberian fleksibilitas dalam larangan ekspor bahan mentah. Reformasi ini harus berjalan seiring dengan upaya

reformasi struktural berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan iklim investasi, perampingan regulasi bisnis, dan pengurangan hambatan non-tarif untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung. Kegagalan melaksanakan agenda reformasi tersebut akan membuat Indonesia semakin rentan terhadap kebijakan proteksionis AS sekaligus berisiko kehilangan daya saing di pasar global.

2. Kunci keberhasilan terletak pada: strategi diversifikasi pasar/peningkatan daya saing jangka menengah-panjang, menghindari ego sektoral dan memastikan langkah terpadu, mengejar hasil negosiasi parsial yang dapat dicapai (pengecualian, kuota, transisi) dengan cepat, sambil memperkuat hubungan dagang dengan mitra alternatif.
3. Mempercepat hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekspor untuk membangun ketahanan jangka panjang. Keberhasilan mitigasi dampak sangat bergantung pada kecepatan, koordinasi, dan realisme dalam merespons tantangan.
4. Diplomasi perdagangan, ekonomi, sosial, dan politik luar negeri perlu diperkuat. Dalam konteks perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, diplomasi yang komprehensif menjadi penting untuk ditinjau dan disempurnakan agar lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia, termasuk transparansi dan keterbukaan kepada publik.

## Referensi

1. Responding to the 32% US Tariff: Indonesia's Next Steps - ARMA Law, diakses Mei 14, 2025, <https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/responding-to-the-32-us-tariff-indonesias-next-steps>
2. Trump's Tariff Effect on Indonesian and Southeast Asian Market | Indonesia Investments, diakses Mei 14, 2025, <https://www.indonesia-investments.com/business/business-columns/trump-s-tariff-effect-on-indonesian-and-southeast-asian-market/item9812>
3. Bali Exports to Suffer in Trump's Tariff War - Bali Discovery, diakses Mei 14, 2025, <https://www.balidiscovery.com/bali-exports-to-suffer-in-trumps-tariff-war/>
4. Indonesia Hit with 32% Import Tariff Increase by Trump Administration, diakses Mei 14, 2025, <https://business-indonesia.org/news/indonesia-hit-with-32-import-tariff-increase-by-trump-administration>
5. Tariffs in the second Trump administration - Wikipedia, diakses Mei 14, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Tariffs\\_in\\_the\\_second\\_Trump\\_administration](https://en.wikipedia.org/wiki/Tariffs_in_the_second_Trump_administration)
6. Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security - The White House, diakses Mei 14, 2025, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/>
7. US Tariffs on Indonesian Imports: A New Challenge for Trade - Kaltimber, diakses Mei 14, 2025, <https://www.kaltimber.com/blog/us-tariffs-on-indonesian-imports-a-new-challenge-for-trade>
8. Indonesia to Loosen Local Content Rules Amid US Tariff Negotiations - The Diplomat, diakses Mei 14, 2025, <https://thediplomat.com/2025/05/indonesia-to-loosen-local-content-rules-amid-us-tariff-negotiations/>
9. Here's a look at the sectors getting a boost from the truce in the US-China trade war - AP News, diakses Mei 14, 2025, <https://apnews.com/article/china-trump-tariff-delta-gap-target-amazon-fb94216c7b931d517e69e8d717a1e9a6>

10. U.S. and China Agree to Reduce Tariffs for 90 Days | International Trade Insights, diakses Mei 14, 2025,  
<https://www.internationaltradeinsights.com/2025/05/u-s-and-china-agree-to-reduce-tariffs-for-90-days/>
11. U.S.-China tariff truce offers temporary relief — and plenty of uncertainty - CBS News, diakses Mei 14, 2025, <https://www.cbsnews.com/news/tariffs-china-trump-trade/>
12. Dow jumps, S&P 500 climbs following 90-day truce in US-China trade war - AP News, diakses Mei 14, 2025,  
<https://apnews.com/article/stocks-markets-trade-trump-catl-62fbd84396aaea011c68231363b283de>
13. State of U.S. Tariffs: May 12, 2025 | The Budget Lab at Yale, diakses Mei 14, 2025,  
<https://budgetlab.yale.edu/research/state-us-tariffs-may-12-2025>
14. Understanding the Temporary De-Escalation of the U.S.-China Trade War - CSIS, diakses Mei 14, 2025,  
<https://www.csis.org/analysis/understanding-temporary-de-escalation-us-china-trade-war>
15. Analyzing the Impact of the U.S.-China Trade War on China's Energy Transition - CSIS, diakses Mei 14, 2025,  
<https://www.csis.org/analysis/analyzing-impact-us-china-trade-war-chinas-energy-transition>
16. US hits Indonesia with tariffs – will nickel be its Trump card? | Opinion - Eco-Business, diakses Mei 14, 2025,  
<https://www.eco-business.com/opinion/us-hits-indonesia-with-tariffs-will-nickel-be-its-trump-card/>
17. Which Indonesian Commodities Are Mostly Affected by the Increase in US Import Tariffs?, diakses Mei 14, 2025,  
<https://indoshoppinggazette.com/2025/which-indonesian-commodities-are-mostly-affected-by-the-increase-in-us-import-tariffs/>
18. A silver lining in the US tariff policy for Indonesias economy - ANTARA News, diakses Mei 14, 2025,  
<https://en.antaranews.com/amp/news/351121/a-silver-lining-in-the-us-tariff-policy-for-indonesias-economy>
19. How U.S. Reciprocal Tariffs Impact Indonesia's Economy – Key Effects & Responses, diakses Mei 14, 2025,  
<https://asliri.id/blog/how-u-s-reciprocal-tariffs-impact-indonesias-economy-key-effects-responses/>
20. SOCIAL MEDIA INSIGHTS: THE IMPACT OF U.S. TARIFF IN INDONESIA - Ipsos, diakses Mei 14, 2025,  
[https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2025-04/Ipsos%20Indonesia%20Insight%20-%20A%20Glimpse%20into%20the%20Reaction%20and%20Impact%20of%20Tariff%20Wars%20in%20Indonesia%20-%20April%202025\\_2.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2025-04/Ipsos%20Indonesia%20Insight%20-%20A%20Glimpse%20into%20the%20Reaction%20and%20Impact%20of%20Tariff%20Wars%20in%20Indonesia%20-%20April%202025_2.pdf)
21. Economic Bulletin – Issue 65 Trump's “Reciprocal Tariffs”: Global Trade Shock and Implications for Indonesia - IFG Progress, diakses Mei 14, 2025,  
[https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2025/04/Econ.-Bulletin-US-Tariff-Impact-to-Indonesia\\_vf.pdf](https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2025/04/Econ.-Bulletin-US-Tariff-Impact-to-Indonesia_vf.pdf)

22. U.S. tariff policy threatens Indonesian competition, SMEs: KPPU | Indonesia Business Post, diakses Mei 14, 2025,  
<https://indonesiabusinesspost.com/4265/policy-and-governance/u-s-tariff-policy-threatens-indonesian-competition-smes-kppu>
23. US tariffs are a wake-up call for Indonesia to diversify and reform | East Asia Forum, diakses Mei 14, 2025,  
<https://eastasiaforum.org/2025/05/03/us-tariffs-is-a-wake-up-call-for-indonesia-to-diversify-and-reform/>
24. What US President Trump's tariff pause means for Indonesia - Asia News Network, diakses Mei 14, 2025,  
<https://asianews.network/what-us-president-trumps-tariff-pause-means-for-indonesia/>
25. Josua Pardede, Efek Domino Tarif Trump, Ancaman atau Peluang bagi ekonomi Indonesia. Webinar OJK 15 Mei 2025.